

PENDEKATAN KESISTEMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI DALAM PENANGANAN RADIKALISME DAN TERORISME

Supardi Hamid

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta 12160

e-mail: supardihamid@gmail.com

Abstract

Riset ini bertujuan untuk mengetahui langkah kepolisian dalam mengelola SDM yang jumlahnya terbatas untuk menangani ancaman penyebaran radikalisme dan terorisme sebagai bentuk tanggapan kepolisian terhadap perubahan spektrum ancaman radikalisme yang mengalami perubahan pada tataran modus dan media penyebaran yang tidak lagi berbasis pada interaksi tatap muka. Tantangan penyebaran radikalisme dan terorisme yang semakin kompleks dan semakin massif, yang dapat memapar kelompok masyarakat manapun membutuhkan penanganan yang lebih sistematis. Permasalahan penelitian adalah bagaimana pendekatan kesisteman diterapkan dalam pengelolaan SDM Polri sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam penanganan ancaman penyebaran radikalisme dan terorisme. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan wawancara dan studi dokumen, serta survai yang ditujukan untuk mengetahui pemahaman anggota Polri di lapangan berkaitan dengan perubahan pola penyebaran radikalisme dan terorisme serta untuk memahami bagaimana mekanisme pembagian pekerjaan berdasarkan fungsi-fungsi yang ada di setiap satuan kewilayahan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat pemahaman masih pada derajat sedang, serta modalitas utama yang digunakan masih mengandalkan pendekatan pemolisian masyarakat. Masing-masing fungsi belum sepenuhnya melakukan pekerjaan penanganan radikalisme dan terorisme berorientasi pada sebuah sistem kerja yang organis. Kesesuaian fokus dan hasil pekerjaan pada tingkat individual dengan tingkat satuan fungsi relatif baik, namun kesesuaian fokus dan capaian pekerjaan pada tingkat individual dengan tingkat satuan kewilayahan belum sepenuhnya baik.

Kata kunci: radikalisme, pendekatan kesisteman, sumber daya manusia, terorisme

Abstract

The purpose of this research is to determine the steps of the police in managing a limited number of human resources to deal with the threat of the spread of radicalism and terrorism. This is a form of police response to changes in the spectrum of radicalism threats that have changed at the level of modes and media of dissemination that are no longer based on face-to-face interactions. The increasingly complex and increasingly massive challenges of spreading radicalism and terrorism, which can expose any group of people require more systematic handling. The research problem is how the systemic approach is applied in managing police human resources so that it can have greater impact in handling the threats of spreading radicalism and terrorism. The study employs post-positivism paradigm with a case study method. Data collection techniques fully use interviews and document studies, as well as

surveys aimed at determining the understanding of police members in the field related to changing patterns of spreading radicalism and terrorism as well as to understand how the mechanism of division of work is based on the functions that exist in each regional unit. The results of the study reveal that the level of understanding is still at a moderate degree, and the main modalities used still rely on the community policing approach. Each function has not fully carried out the work of dealing with radicalism and terrorism oriented towards an organizational work system. The suitability of focus and work results at the individual level with the unit level of function is relatively good, but the suitability of focus and work achievements at the individual level with the regional unit level is not completely good

Keywords: *human resources, radicalism, systemic approach, terrorism*

Pendahuluan

Salah satu tantangan di bidang keamanan adalah persoalan radikalisme dan terorisme, yang merupakan salah satu dari banyak ancaman serius bagi kemanusiaan dan kehidupan bernegara, mengingat dampak yang ditimbulkan dari radikalisme dan terorisme begitu luas. Terorisme, menurut Hofman (1999) adalah “suatu aktivitas politis manusia yang dilakukan dengan sengaja dan diarahkan pada penciptaan iklim ketakutan pada umumnya, dan dirancang untuk mempengaruhi, dalam berbagai cara yang diinginkan oleh pelaku, manusia lain dan melalui beberapa rangkaian peristiwa.”

Schmid dan Jongman (2005 :28) menyatakan “terorisme sebagai sebuah metode yang terinspirasi dari kegelisahan atas tindakan kejam yang dilakukan berulang-ulang, yang digunakan oleh seseorang, kelompok atau pelaku yang memiliki kekuasaan yang sifatnya (semi) rahasia, karena alasan tabiat, kriminal atau politik, yang berbeda arti dengan pembunuhan yang sasaran utamanya adalah kekerasan yang mengakibatkan orang meninggal.”

Korban tindak pidana terorisme adalah manusia yang umumnya dipilih secara acak, merupakan sasaran karena kesempatan atau secara selektif merupakan sasaran representatif atau simbolis dari populasi sasaran, dan bertindak sebagai pembawa pesan. Proses komunikasi berdasarkan ancaman dan kekerasan antara pelaku teror (organisasi), korban (dalam keadaan bahaya) dan sasaran utama digunakan untuk memanipulasi sasaran utama (audiensi), mengubahnya menjadi sasaran teror, suatu sasaran tautan, atau target perhatian, tergantung pada apakah memang diupayakan adanya intimidasi, paksaan atau propaganda. Organisasi dunia juga menyoroti tentang terorisme. Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) melalui *Internastional*

Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, mendefinisikan terorisme “sebagai setiap tindakan lain yang dimaksudkan untuk menyebabkan kematian atau cedera serius pada rakyat sipil, atau ke setiap orang lain yang tidak ada kaitannya dengan suatu permusuhan dalam konflik bersenjata, ketika tujuan tindakan tersebut, berdasarkan sifat atau konteksnya, adalah untuk mengintimidasi masyarakat, atau memaksa suatu pemerintah atau suatu organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.”

Telah terjadi elevasi (peningkatan) dalam hal modus operandi dan peta terorisme di Indonesia. Terjadinya pergeseran aksi terorisme antara lain ditandai dengan modus kelompok radikal teror yang dalam mempersiapkan aksinya saat ini mulai secara terang-terangan bergabung dan berbaur di tengah-tengah masyarakat (*clandestine*) dan menjadikan anak muda sebagai target untuk mempelajari teknis pembuatan bom secara autodidak (interpretasi personal). Keterlibatan pemuda ini dapat terlihat dari data pelaku bom bunuh diri sejak Bom Bali I sampai yang terakhir di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton Solo. Semua tindak pidana ini dilakukan oleh pemuda dengan rentang usia 18-31 tahun.

Kelompok radikal teroris juga sudah memiliki kemampuan untuk melakukan propaganda, pengumpulan pendanaan, pengumpulan informasi, perekrutan serta penghasutan dengan menggunakan media internet dan jejaring media elektronik lain seperti radio untuk kepentingan kelompok yang tidak bertanggung jawab. Propaganda radikal teror juga dapat dilihat dengan munculnya ratusan *website*, puluhan buku, serta siaran *streaming* radio yang secara aktif menyebarkan paham intoleran, menghasut, dan menyebarkan kebencian di antara sesama anak bangsa.

Perkembangan era globalisasi yang memunculkan media internet menjadikan media komunikasi yang digunakan teroris semakin berkembang, Mereka berusaha menyesuaikan kemampuan mereka dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang ada (Sarinastiti & Vardhani, 2018: 40). Penggunaan media Internet oleh teroris tidak hanya sebagai sarana komunikasi antar sesama anggota tetapi juga sebagai wadah penyebar teror. Hal ini yang disebut kemudian sebagai *cyberterrorism*. Perkembangan tindak terorisme melalui ruang siber terus berkembang seiring berkembangnya teknologi dan informasi yang ada.

Konsep lain yang juga berkaitan erat dengan terorisme adalah radikalisme, yang merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan

nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal:

1. intoleran—tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain;
2. fanatik—selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah;
3. eksklusif—membedakan diri dari umat Islam umumnya; dan
4. revolusioner—cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan.

Memiliki sikap dan pemahaman radikal saja tidak mesti menjadikan seseorang terjerumus dalam paham dan aksi terorisme. Ada faktor lain yang memotivasi seseorang bergabung dalam jaringan terorisme. Motivasi tersebut timbul disebabkan oleh banyak faktor. Gambaran serupa diperoleh dari studi Schaefer (2003: 93-94) serta Nacos dan Torres-Relma (2003: 135). Pada dasarnya teroris juga menggunakan Internet untuk beberapa alasan yang sama yang dilakukan orang lain; untuk komunikasi intra organisasi dan perencanaan gerakan, mendidik pengikut dan bahkan untuk hiburan. Sebagian besar topik komunikasi *online* para teroris adalah hal yang biasa hingga ke tingkat berbahaya (Klausen, 2015).

Salah satu alasan munculnya radikalisme di Indonesia adalah adanya halaman *online*, akun media sosial, portal *online* dan video yang sengaja dirancang untuk menyebarkan ideologi kekerasan dan pidato kebencian, termasuk gagasan mendirikan negara Islam. Media sosial dan jaringan online sebagai sarana komunikasi massa sangat strategis karena dapat bersifat anonim, memiliki jangkauan yang luas dan juga cukup biaya rendah. Karena itu media sosial adalah pilihan praktis untuk menyebarluaskan pandangan politik dan pandangan radikal kepada siapa saja yang memiliki konektivitas dengan jaringan *online*. Banyak jihadis yang diidentifikasi dalam kasus-kasus yang dibahas di sini memulai perjalanan mereka menuju radikalisasi di Internet, di mana mereka menemukan resonansi dan penguatan untuk kekecewaan dan kemarahan mereka (Jenkins B. M., 2011).

Pada masa Pandemi Covid-19, penyebaran radikalisme dan tindakan terorisme tidak mengalami surut, bahkan terjadi peningkatan serangan di beberapa lokasi pada masa pandemi. Hal ini juga mengindikasikan bahwa penyebaran radikalisme juga sudah barang tentu mengalami eskalasi peningkatan penyebaran pada masa pandemik ini. Pada sisi lain, fokus perhatian kepolisian juga terpecah untuk memberikan perhatian dan dukungan dalam penanganan penyebaran Covid-19 dan antisipasi terhadap dampak pandemi terhadap persoalan

keamanan.

Gambaran di atas memperlihatkan bahwa radikalisme dan terorisme telah mengalami perkembangan dari sisi modus dan media yang digunakan. Digunakannya teknologi informasi dalam penyebaran konten radikalisme dan terorisme telah menyebabkan semakin acak dan meluasnya spektrum penyebaran radikalisme dan gagasan terorisme. Artinya, peluang keterpaparan masyarakat terhadap paham radikal dan teroris tidak lagi tersegmentasi secara jelas. Siapa saja dan lapisan masyarakat yang manapun memiliki peluang keterpaparan. Situasi demikian tentunya akan meningkatkan kompleksitas tantangan dan menuntut penanganan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Bagi kepolisian hal ini tentu saja berimplikasi pada perlunya penggunaan sumber daya kepolisian secara efektif dan terintegrasi dalam menghadapi ancaman penyebaran radikalisme dan terorisme yang semakin acak. Jika tidak, maka langkah pemolisian akan menjadi tidak efisien dan sulit untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Pengelolaan SDM kepolisian menjadi hal yang sangat penting sebagai salah satu kunci keberhasilan penanganan persoalan radikalisme dan terorisme. Salah satu pendekatan dalam pengelolaan sumberdaya kepolisian, terutama SDM, adalah pendekatan kesisteman. Melalui pendekatan kesisteman ini, persoalan radikalisme dan terorisme akan dilihat secara holistik dan menyeluruh (multi aspek) serta terintegrasi yang dapat memaksimalkan *impact* dari sumber daya yang ada dalam menangani tantangan penyebaran radikalisme dan terorisme yang spektrumnya semakin luas dan acak. Pengelolaan SDM kepolisian dalam kegiatan *policing* terhadap persoalan radikalisme dan terorisme dimungkinkan untuk diarahkan secara bersama-sama dan terintegrasi untuk mengintervensi keseluruhan aspek dari persoalan radikalisme dan terorisme. Dalam penelitian ini, fokus penelitian akan ditujukan pada penanganan permasalahan penyebaran radikalisme dan ancaman terorisme di tengah masyarakat oleh satuan kewilayahan melalui penerapan pendekatan kesisteman dalam pengelolaan SDM kepolisian.

Perumusan Masalah

Penyebaran radikalisme dan terorisme yang tidak lagi tersegmentasi secara jelas sebagai dampak pemanfaatan teknologi informasi oleh kelompok/jaringan radikal teroris telah menyebabkan perubahan pada potensi masyarakat yang dapat terpapar paham radikal teroris, yang menyebabkan perlunya perubahan pola pemolisian berkaitan dengan penanganan

radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat. Pada saat yang sama, pengelolaan SDM kepolisian yang akan digerakkan untuk menangani persoalan radikalisme dan terorisme juga membutuhkan pendekatan yang tentunya juga harus selaras dengan perubahan media dan pola penyebaran paham radikal teroris, dalam hal ini persoalan radikalisme dan terorisme secara luas. Dalam konteks pembelajaran pada pengembangan Ilmu Kepolisian, khususnya dalam arah pengembangan kurikulum pendidikan dan materi pembelajaran, perlu ditemukeni sejumlah aspek yang relevan untuk diakomodasi dalam proses pembelajaran. Permasalahan penelitian ini yang didasarkan pada fakta tersebut dirumuskan menjadi: Bagaimana penanganan radikalisme dan terorisme melalui pendekatan kesisteman pengelolaan SDM kepolisian?

Pertanyaan Penelitian

Beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pemahaman petugas kepolisian terhadap hakikat ancaman radikalisme dan terorisme di wilayah tempat tugasnya?
2. Aspek-aspek apa saja dari persoalan radikalisme dan terorisme yang menjadi perhatian utama oleh satuan kewilayahan?
3. Bagaimana mekanisme pembagian pekerjaan bagi SDM Polri di satuan kewilayahan dalam menangani ancaman radikalisme dan terorisme?
4. Bagaimana mekanisme memastikan kesesuaian capaian individual dengan target/sasaran pada tingkat satuan/fungsi/polsek dan selanjutnya dengan kesesuaian target/sasaran pada tingkat satuan kewilayahan?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pemahaman petugas kepolisian terhadap hakikat ancaman radikalisme dan terorisme di wilayah tempat tugasnya.
2. Mengetahui aspek penting dari persoalan radikalisme dan terorisme yang menjadi perhatian utama oleh satuan kewilayahan.
3. Mengetahui mekanisme dan pembagian pekerjaan dalam menangani radikalisme dan terorisme pada tingkat individual, satuan/fungsi dan di tingkat polsek di satuan kewilayahan.

4. Mengetahui mekanisme di tingkat satuan kewilayahan dalam memastikan kesesuaian capaian individual dengan target/sasaran pada tingkat satuan/fungsi/polsek dan selanjutnya dengan kesesuaian target/sasaran pada tingkat satuan kewilayahan dalam penanganan radikalisme dan terorisme.

Manfaat Penelitian

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Ilmu Kepolisian, khususnya kajian tentang radikalisme dan terorisme serta kajian tentang SDM kepolisian dengan pendekatan kesisteman, dan dapat menjadi referensi empiris bagi kegiatan riset dan pengajaran di bidang Ilmu Kepolisian. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan bagi pengembangan praktik penanganan radikalisme dan terorisme oleh satuan kewilayahan, terutama aspek pengelolaan SDM kepolisian.

Kajian Literature

Radikalisme

Radikalisme yaitu paham yang melekat pada seseorang atau kelompok yang mengusung ideologi keagamaan yang menginginkan perubahan baik sosial, politik dengan menggunakan kekerasan dan bertindak ekstrem. Kata radikalisme ini juga memiliki varian pengertian. Simpulan dari segenap pengertian tersebut terkait erat dengan pertentangan secara tajam antara nilai-nilai yang diperjuangkan oleh kelompok agama tertentu dengan tatanan nilai yang berlaku atau dipandang mapan pada saat itu. Sepintas pengertian ini berkonotasi kekerasan fisik, padahal radikalisme merupakan pertentangan yang sifatnya ideologis. Atas dasar itu, radikalisme merupakan paham (isme), tindakan yang melekat pada seseorang atau kelompok yang menginginkan perubahan baik sosial, politik dengan menggunakan kekerasan, berpikir asasi, dan bertindak ekstrem. Penyebutan istilah radikalisme dalam tinjauan sosio-historis pada awalnya dipergunakan dalam kajian sosial budaya dan dalam perkembangannya istilah tersebut dikaitkan dengan persoalan politik dan agama. Istilah radikalisme merupakan konsep yang akrab dalam kajian keilmuan sosial, politik, dan sejarah. Istilah radikalisme digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial dalam suatu masyarakat atau negara.

Terorisme

Terorisme berasal dari kata teror, dalam bahasa Inggris disebut *terror*. Kata *terror*

sendiri berasal dari bahasa Latin ‘*terrorem*’ yang memiliki arti rasa takut yang luar biasa. Kata kerjanya *terrere* yang berarti membuat takut atau menakut-nakuti (Golose, 2014). Dalam Webster’ New World Dictionary (1991 : 1381), kata terorisme berasal dari bahasa Prancis yaitu *terrorisme* yang merujuk pada istilah yang digunakan pasca terjadinya Revolusi Prancis dan dimulainya *Regim Of Terror* (1793-1794) yang memerintah dengan cara mempraktikkan terror dalam setiap kebijakannya. Penggunaan kata *terror* juga diterapkan di Inggris pada tahun 1798 yang juga merujuk pada suatu kebijakan yang bersifat mengintimidasi. Penyebutan terror kemudian mulai berkembang ke seluruh dunia dengan merujuk kepada perbuatan yang menakut-nakuti atau intimidasi.

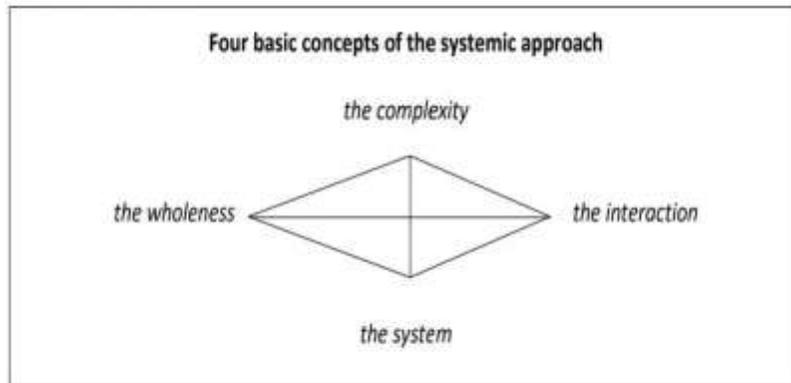
Pengertian terorisme yang lain diungkapkan oleh Golose (2014) yang menyatakan bahwa “terorisme adalah setiap tindakan yang melawan hukum dengan cara melakukan teror secara meluas kepada masyarakat, dengan ancaman atau cara kekerasan baik yang diorganisir maupun tidak serta menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan/atau psikologis dalam waktu berkepanjangan, sehingga dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*).”

Pendekatan kesisteman

Donnadieu, et. al., (2017) menjelaskan bahwa pendekatan kesisteman merupakan suatu disiplin/bidang yang mengintegrasikan pendekatan teoritis, pendekatan praktis, dan pendekatan metodologis yang berkaitan dengan kajian yang sangat kompleks untuk didekati dengan pendekatan reduksionis, memiliki persoalan batasan, memiliki persoalan hubungan internal dan eksternal, memiliki persoalan structural, persoalan aturan atau aspek-aspek yang mencirikan sebuah sistem seperti model observasi, representasi, pemodelan atau simulasi totalitas yang kompleks. Secara teoritis, pendekatan ini memiliki empat konsep dasar (lihat Gambar 1).

Sementara itu, Goranov (2019) mengatakan bahwa aspek penting dan harus ada dalam sebuah sistem adalah adanya elemen-elemen, adanya sejumlah kondisi yang menjadi syarat hubungan antar elemen, serta koneksi/keterkaitan antar elemen yang dihasilkan di dalam sistem yang diciptakan. Sebuah pendekatan kesisteman adalah riset sistem keorganisasian yang berbasis pada fakta bahwa setiap organisasi adalah sistem, dan setiap bagian-bagian atau elemen di dalamnya memiliki makna dan tujuan masing-masing dan tujuan dan

pengendaliannya adalah untuk memastikan bahwa masing-masing elemen terintegrasi satu sama lain.



Gambar 1 Empat konsep dasar pendekatan kesisteman
Sumber: Donnadieu, et.al., 2017)

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat persoalan radikalisme dan terorisme yang ditangani dengan pendekatan kesisteman dalam pengelolaan SDM kepolisian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Dengan menggunakan studi kasus, maka penanganan radikalisme dan terorisme dengan menggunakan pendekatan kesisteman dalam pengelolaan SDM kepolisian akan diperlakukan sebagai sebuah kasus.

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan survei. Wawancara digunakan untuk menjangkau informasi berupa pernyataan langsung dari subyek berkaitan dengan pengalaman serta persepsi dan sikap. Survei bertujuan untuk mendapatkan data deskriptif terkait dengan pemahaman anggota Polri tentang persoalan radikalisme dan terorisme, serta sikap anggota Polri terhadap pembagian peran dan tugas baik pada level satuan maupun pada level individual serta sinkronisasi masing-masing peran.

Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Sumber data dan informasi terdiri dari sumber primer berupa pernyataan, maupun produk tertulis yang memuat data atau keterangan mengenai penanganan radikalisme dan terorisme serta pengelolaan SDM. Sumber data sekunder berupa data/informasi yang dikeluarkan oleh kepolisian maupun lembaga di luar kepolisian yang dapat menjadi data pendukung dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan

di Polda Aceh, Polda Kalimantan Tengah, Polda Sumatera Utara, dan Polda Sulawesi Selatan mulai dari tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2021.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Informan dan Responden Penelitian

Informan penelitian adalah para pejabat di tingkat Polda dan Polres jajaran, meliputi: personel Bagian Operasi, Bagian Sumberdaya, Satuan Intelijen Keamanan, Satuan Binmas, Satuan Reskrim, dan Bhabinkamtibmas dari Polsek perwakilan di masing-masing Polres jajaran. Para pejabat di tingkat Polda terdiri dari Kapolda dan Wakapolda, Kepala Biro Operasi, Direktur Binmas, Direktur Intelijen, Direktur Reskrimum, dan Kepala Biro SDM, serta para Kabag, Kasubdit, dan anggota pelaksana.

Jumlah responden penelitian yang terlibat dalam proses pengumpulan data di Polda Aceh, Polda Kalimantan Tengah, Polda Sumatera Utara, dan Polda Sulawesi Selatan dan Polres jajaran berjumlah 2.000 orang responden. Karakteristik responden terlihat pada tampilan data yang disajikan dalam bentuk chart berikut:

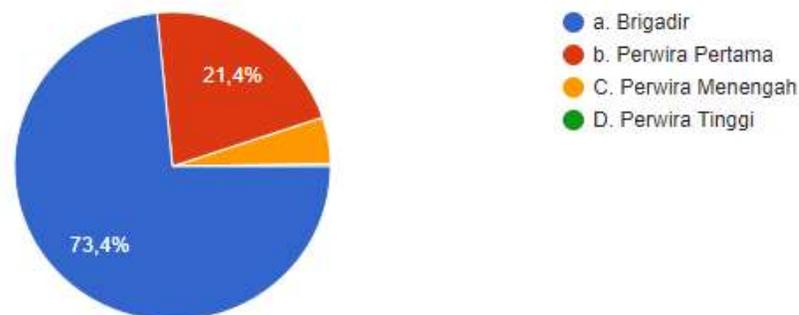


Chart 1 Gambaran responden berdasarkan pangkat

Chart 1 menunjukkan proporsi sebaran jumlah personil Polri di wilayah hukum polda yang menjadi sasaran penelitian, yang jumlah terbanyak adalah pada level Bintara, diikuti oleh perwira pertama dan perwira menengah yang jumlahnya jauh lebih sedikit.

Chart 2 secara tersirat bermakna bahwa sebagian besar responden adalah personil yang telah memiliki pengalaman berdinis yang sudah relatif matang.

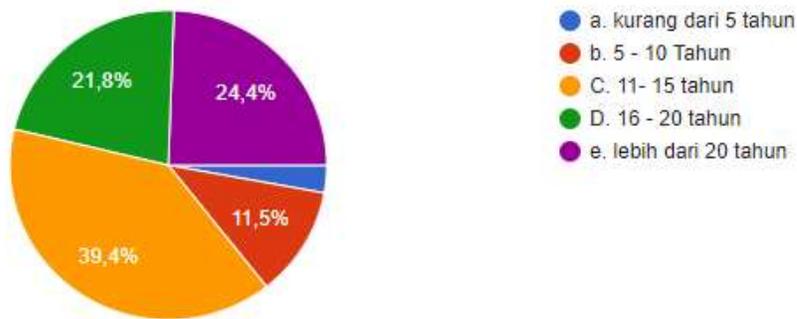


Chart 2 Lama dinas

Pengetahuan tentang radikalisme dan terorisme

Data yang disajikan pada bagian ini merupakan data dan informasi yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data yang disajikan pada merupakan data yang diperoleh melalui survai terhadap responden penelitian dan hasil wawancara dan FGD dengan informan serta data yang diperoleh melalui telaah terhadap dokumen yang dikumpulkan dalam proses pengumpulan data. Pengetahuan anggota Polri di lapangan mengenai radikalisme dan terorisme digali melalui tanggapan responden terhadap pertanyaan yang berkisar seputar pengetahuannya, sumber pengetahuannya, dan sikap responden terhadap ciri radikalisme mulai dari ciri fisik, ciri dalam bentuk narasi dan ciri dalam bentuk perbuatan, yang akan digunakan sebagai cara untuk melihat konsistensi persepsi tentang tingkat pengetahuan dengan realitas pemaknaan tentang radikalisme dan terorisme.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota intelijen di Polres-Polres jajaran Polda yang menjadi sasaran penelitian, diperoleh kesan bahwa pengetahuan personel tentang radikalisme dan terorisme relatif baik. Anggota intel bukan sekedar memahami makna dan konsepsi tentang radikalisme dan terorisme tapi juga dapat menjelaskan kondisi dan keberadaan terorisme dan radikalisme di wilayah tempat tugasnya. Akan tetapi didapatkan kesan pula bahwa mereka mengalami kesulitan untuk menyimpulkan perilaku maupun ciri orang yang terpapar paham radikal karena mereka tidak memiliki pedoman atau panduan yang dapat dijadikan acuan untuk secara tepat menyimpulkan indikasi secara formal tentang orang yang sudah berperilaku atau memiliki ciri terpapar radikalisme. Fungsi lain yang juga memiliki tingkat pemahaman yang relatif baik tentang radikalsime dan terorisme adalah anggota Satuan Binmas, terutama anggota Bhabinkamtibman. Akan tetapi tidak semua

anggota Polri di kewilayahan yang memahami secara baik makna dan konsep radikalisme dan terorisme. Ketika FGD dilakukan, anggota yang bukan berasal dari fungsi intelijen dan fungsi Binmas banyak yang menyatakan tidak terlalu memahami konsep radikalisme dan terorisme. Sebagian bahkan merasa bingung karena begitu banyak pengertian tentang konsep ini. Fakta ini juga selaras dan relevan dengan temuan yang didapatkan melalui survei terhadap personil Polri di lapangan sebagaimana disajikan pada Chart 3.

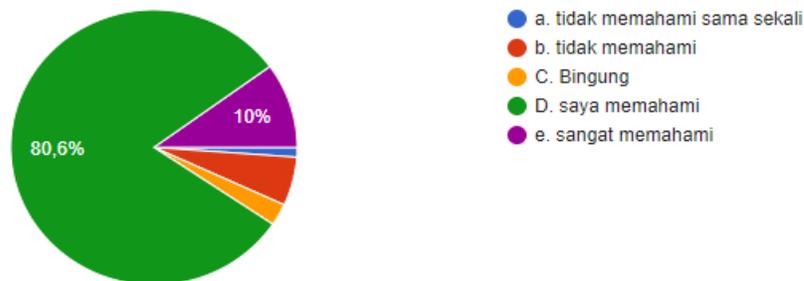


Chart 3 Pengetahuan responden tentang radikalisme dan terorisme

Diagram di atas menunjukkan bahwa sebagian besar personil Polri memahami persoalan radikalisme dan terorisme dan hanya sebagian kecil yang menyatakan tidak memahami konsep radikalisme dan terorisme.

Berbagai sumber pengetahuan juga digunakan oleh anggota Polri untuk memahami konsep terorisme dan radikalisme serta berbagai fenomena yang berkaitan dengan kedua konsep ini. Menurut anggota Polri di lapangan, persoalan radikalsime dan terorisme adalah persoalan serius yang dihadapi oleh kepolisian. Mereka juga tidak jarang dimintai penjelasannya oleh masyarakat di mana mereka berada terkait dengan isu-isu seputar terorisme dan radikalisme. Hal ini menyebabkan mereka berupaya untuk mendapatkan pengetahuan tentang radikalisme dan terorisme serta realitas di seputar isu ini. Beragam sumber pengetahuan yang mereka jadikan sebagai tempat memperoleh pengetahuan juga tergambar dari hasil survei yang datanya tersaji pada Chart 4 yang memperlihatkan bahwa media Internet merupakan sumber pengetahuan terbesar bagi mereka untuk memahami konsep-konsep radikalisme dan terorisme dan kegiatan sosialisasi menempati urutan kedua.

Pemahaman anggota Polri tentang batasan radikalisme dan terorisme menurut UU yang mengatur tindak pidana terorisme juga ternyata bervariasi. Hal ini disebabkan tidak

semua anggota Polri yang diwawancarai pernah membaca UU ini. Fakta ini didasarkan pada pernyataan anggota Polri pada saat pengumpulan data melalui wawancara dan FGD. Menurut peserta wawancara dan FGD masih sangat sedikit kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan penjelasan mengenai pemaknaan radikalisme dan terorisme menurut hukum. Dalam kegiatan sosialisasi yang mereka dapatkan mengenai radikalisme dan terorisme lebih banyak membicarakan konsep secara umum atau secara akademis menurut pendapat orang-orang atau ahli tertentu. Materi sosialisasi juga lebih banyak bicara faktor yang menyebabkan orang terpapar radikalisme atau terlibat terorisme.



Chart 4 Sumber pengetahuan responden

Tingkat pemahaman anggota Polri tentang radikalisme dan terorisme berdasarkan batasan UU dapat dilihat pada Chart 5 yang menyajikan data survei pemahaman anggota Polri tentang radikalisme dan terorisme berdasarkan UU. Chart 5 ini memperlihatkan tingkat pemahaman responden penelitian mengenai batasan radikalisme dan terorisme berdasarkan UU sebagian besar tidak mengetahuinya. Hal ini menyiratkan perlunya peningkatan penyebaran pengetahuan di kalangan personil.

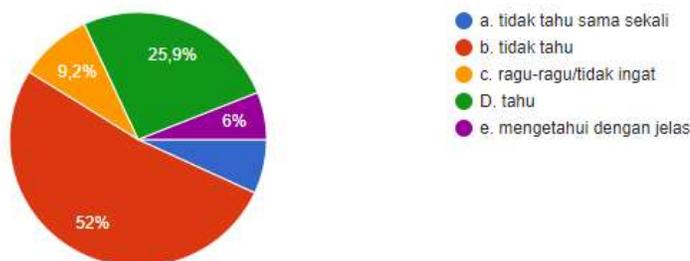


Chart 5 Pemahaman responden tentang radikalisme dan terorisme berdasarkan UU

Pengetahuan anggota Polri tentang aktivitas radikalisme dan terorisme di wilayah

tugasnya masih sangat terbatas. Umumnya yang mampu menjelaskan aktivitas radikalisme dan terorisme di wilayah tugas adalah dari anggota intelijen dan bhabinkamtibmas serta sebagian kapolsek yang dijadikan informan penelitian. sejumlah alasan ketidak tahuan tersebut karena mereka merasa bahwa itu bukan tugas pokok dari satuan fungsi di mana mereka bertugas. Sebagian juga menyatakan bahwa informasi tersebut tidak didistribusikan ke seluruh satuan fungsi sehingga mereka tidak mengetahui adanya aktivitas radikalisme dan terorisme di wilayahnya. Informasi ini terkonfirmasi melalui data yang diperoleh melalui survei. Dari 2000 responden penelitian, ternyata tingkat pengetahuan mengenai aktivitas radikalisme dan terorisme di wilayahnya hanya diketahui oleh sebagian kecil responden penelitian. Hal ini dapat kita lihat pada data yang tersaji pada Chart 6.

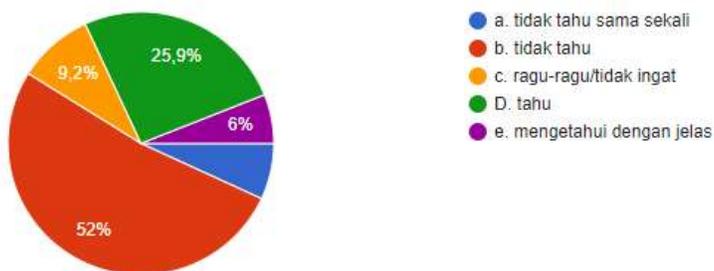


Chart 6 Pengetahuan responden tentang aktivitas radikalisme/terorisme di wilayahnya

Salah satu aspek penting untuk mengetahui tingkat pengetahuan/pemahaman anggota Polri tentang radikalisme adalah melalui sikap yang mereka sampaikan berkaitan dengan ciri dari orang atau kelompok yang dikategorikan radikal. Ciri paling dasar yang digunakan untuk menilai pemahaman tersebut adalah ciri fisik sebagai penanda seseorang adalah radikal atau terpapar gagasan terorisme. Dari hasil wawancara dan FGD yang dilakukan terhadap anggota Polri di lapangan, mulai dari bintara, perwira pertama, maupun perwira menengah, didapat kesan bahwa sebagian besar anggota Polri tidak sepakat jika ciri fisik dijadikan dasar untuk menentukan apakah seseorang terpapar radikalisme atau tidak. Hal ini juga terkonfirmasi secara tegas dari hasil survei yang memperlihatkan sebaran sikap anggota Polri yang menjadi responden penelitian terhadap ciri fisik seperti: memakai celana *cingkrang*, memelihara jenggot, memakai gamis adalah penanda seseorang terpapar radikalisme.

Data yang tersaji pada Chart 7 memperlihatkan mayoritas responden tidak setuju dengan ciri-ciri atau indikasi orang yang terpapar radikalisme.

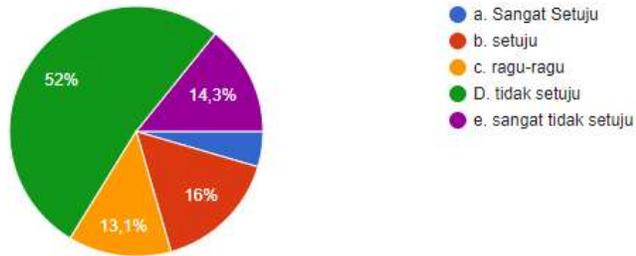


Chart 7 Sikap responden terhadap ciri radikalisme dilihat dari penampilan fisik

Untuk lebih melihat tingkat pengetahuan anggota Polri di lapangan tentang makna dan isu radikalisme dan terorisme, pada saat wawancara dan FGD didiskusikan juga tentang ciri orang yang terpapar radikalisme dilihat dari ucapan dan isi pembicaraannya. Isi ucapan dan pembicaraan yang dimaksud antara lain adalah selalu mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan ide dan gagasan religiusnya, menentang dan tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, mencaci Pancasila, tidak setuju dengan konsep NKRI. Berkaitan dengan ciri radikalisme yang menyangkut isi pembicaraan atau ucapan sebagai penanda orang atau kelompok terpapar radikalisme, sikap anggota Polri terlihat beragam. Terhadap ucapan dan isi pembicaraan sebagai penanda keterpaparan radikalisme, sebagian besar anggota menyatakan setuju. Ketika wawancara dan FGD tidak ada anggota Polri yang secara terbuka menyatakan ketidaksetujuan walaupun ada yang menyatakan bahwa isi pembicaraan dan ucapan tidak secara otomatis dapat diasosiasikan sebagai seseorang atau kelompok adalah radikal. Satu hal yang menarik adalah sikap tidak setuju bahkan sangat tidak setuju justru muncul dari hasil survei. Fakta ini muncul dalam data survei dan dimungkinkan karena sifat survei yang tertutup dan responden merasa lebih bebas dan tidak khawatir untuk menyatakan sikap yang berbeda dengan rekan-rekan kerja lainnya (lihat Chart 8).

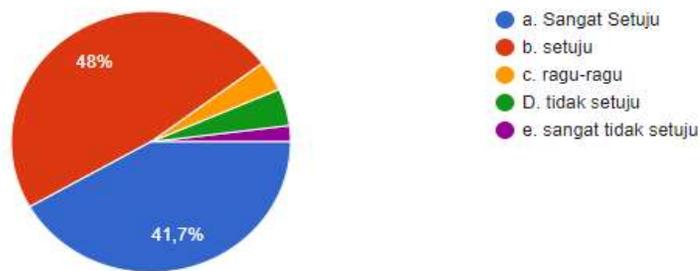


Chart 8 Sikap responden terhadap ciri radikalisme terindikasi dari ucapan dan isi pembicaraan

Sebagian besar responden setuju bahwa ucapan tertentu yang dilontarkan seseorang menunjukkan sikap yang dimilikinya. Untuk lebih mengetahui tingkat pemahaman anggota Polri terhadap radikalisme dan terorisme, isu dalam diskusi FGD dan wawancara adalah seputar ciri orang atau kelompok yang terpapar radikalisme dapat dilihat dari ciri perilaku yang ditampilkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungannya. Perilaku yang dimaksud adalah kesehariannya cenderung menyendiri, memisahkan diri dari lingkungan sosial tempat tinggalnya, hanya bergaul dengan kelompoknya saja, dan cenderung untuk tidak mau beribadah bersama dengan orang yang berbeda kelompok. Dalam diskusi dan wawancara semua informan penelitian menyatakan setuju dengan perilaku demikian sebagai penanda orang atau kelompok radikal. Hal ini mereka perkuat dengan pernyataan dan pengalaman beberapa kasus yang mereka temukan dan mereka informasikan ke intelijen polda, dan fakta yang muncul kemudian orang-orang yang mereka indikasikan tersebut justru terlibat pada tindakan terror di beberapa tempat seperti di Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.

Sama seperti data survei pada Chart 8, hasil survei juga memperlihatkan data pada bagian ini yang cukup mengejutkan. Berbeda dengan situasi wawancara dan FGD yang memperlihatkan sikap menyetujui perilaku sebagai indikasi, data survei justru menampilkan sikap sebagai anggota di lapangan yang menyatakan ketidaksepakatan (lihat Chart 9). Chart 9 menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju dengan ciri radikalisme dilihat dari perilaku mereka.

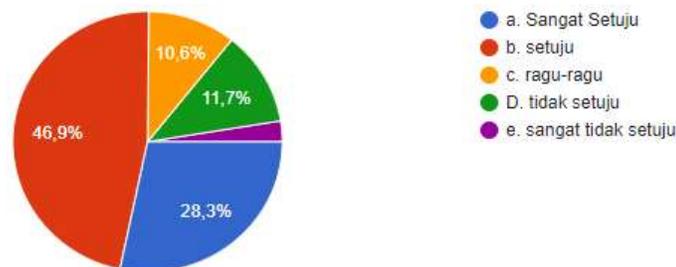


Chart 9 Sikap responden terhadap ciri radikalisme dilihat dari perilaku

Hasil wawancara dan FGD dengan personil di lapangan menyatakan bahwa sosialisasi tentang radikalisme dan terorisme merupakan kegiatan yang sangat berguna bagi mereka untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Sosialisasi dianggap sebagai rujukan yang dapat dipertanggung jawabkan bagi mereka untuk melakukan berbagai kegiatan kepada

masyarakat berkaitan dengan isu radikalisme dan terorisme. Chart 10 ini memperlihatkan bahwa sebagian besar responden setuju dengan pernyataan bahwa kegiatan sosialisasi adalah sumber informasi yang memadai untuk memahami radikalisme dan terorisme.

Perhatian Utama Satuan Kewilayahan terhadap Radikalisme/Terrorisme

Berdasarkan hasil wawancara dan FGD yang dilakukan dalam proses pengumpulan data, aspek yang menjadi fokus perhatian satuan kewilayahan (polres) dalam menangani ancaman penyebaran radikalisme dan terorisme terutama pada aspek pre-emptif dan pencegahan. Informasi dan data yang disajikan merupakan informasi dan data yang akan menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian mengenai aspek yang menjadi perhatian satuan kewilayahan berkaitan dengan radikalisme dan terorisme. Berdasarkan hasil wawancara dan kegiatan FGD, pembagian kerja dalam penanganan ancaman penyebaran radikalisme dan terorisme didasarkan pada tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan atau bagian. Selanjutnya pembagian pekerjaan pada level individu diberikan berdasarkan penugasan yang didelegasikan oleh atasan masing-masing.

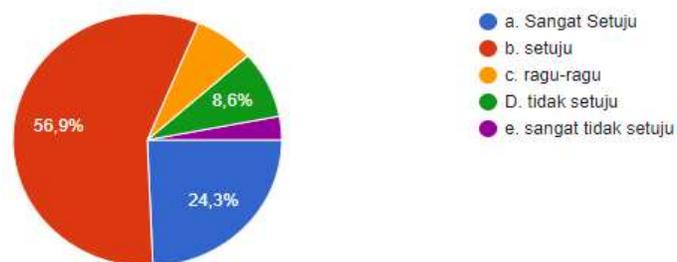


Chart 10 Sosialisasi merupakan sumber informasi yang memadai untuk memahami radikalisme dan terorisme

Pada saat proses pengumpulan data melalui FGD dan wawancara, terungkap bahwa aspek yang menjadi perhatian utama atau fokus satuan kewilayahan berkaitan dengan radikalisme dan terorisme adalah aspek pencegahan. Menurut informan penelitian, tugas yang menjadi perhatian mereka adalah mencegah terjadinya penyebaran radikalisme di tengah masyarakat sesuai segmentasi yang ditetapkan. Selain itu, perhatian utama adalah melakukan deteksi, identifikasi dan monitoring kegiatan di masyarakat yang dapat mengarah pada penyebaran radikalisme dan terorisme.

Beragam bidang kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan penyebaran radikalisme dibebankan kepada satuan fungsi sesuai tugas pokok masing-masing. Selanjutnya satuan fungsi membagi pekerjaan tersebut ke tingkat unit, tim, hingga individual. Informasi yang diperoleh melalui wawancara dan FGD dielaborasi dengan data yang diperoleh melalui survei. Sebaran data kuantitatif terhadap aspek yang menjadi fokus tersebut dapat dilihat pada Chart 11, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah berpengalaman dalam tugas penyuluhan, pencegahan dan atau pemantauan kegiatan atau bahaya radikalisme.

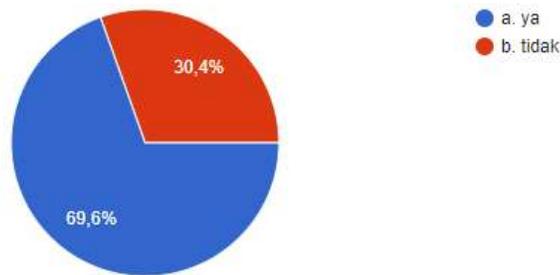


Chart 11 Pengalaman melaksanakan tugas

Chart 12 memperlihatkan bahwa sebagian besar responden berpendapat bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan yang mudah bagi mereka saat melakukannya.

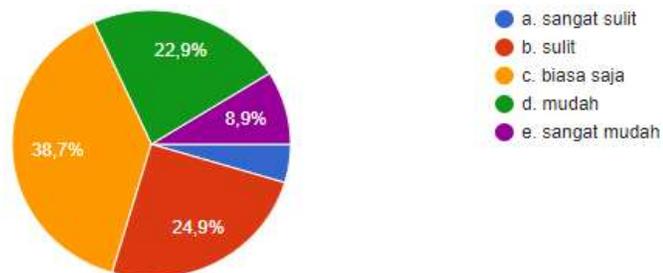


Chart 12 Persepsi tentang kesulitan dalam pelaksanaan tugas

Mekanisme Pembagian Kerja

Chart 13 menampilkan tanggapan responden penelitian tentang kesamaan jenis pekerjaan atau kegiatan yang dilakukannya dengan yang dilakukan oleh rekan kerjanya. Lebih dari setengah responden menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukannya sama dan bahkan sama persis dengan kegiatan yang dilakukan oleh rekan kerjanya.

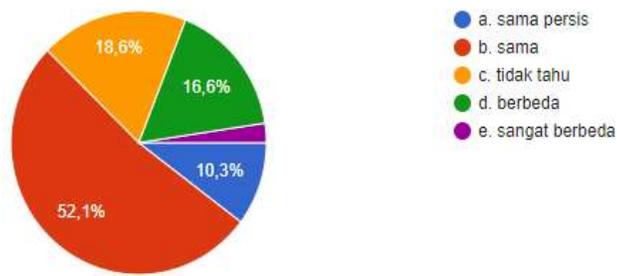


Chart 13 Kesamaan tugas dengan rekan kerja

Chart 14 di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa kegiatan yang mereka lakukan dalam tim atau dilakukan secara bersama dengan mekanisme pembagian tugas.

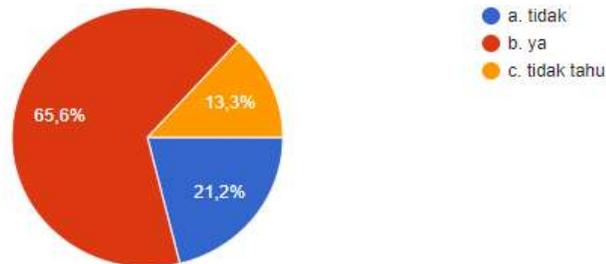


Chart 14 Pelaksanaan tugas/perkerjaan dalam tim

Chart 15 memperlihatkan pengalaman responden dalam melakukan kegiatan atau pekerjaannya harus menyiapkan materi sendiri materi yang diperlukan atau telah disiapkan oleh fungsi di mana responden bertugas dan hampir setengah dari responden menyatakan bahwa materi yang dibawakannya disediakan namun hanya bersifat umum sehingga perlu ditambah dan didetailkan.

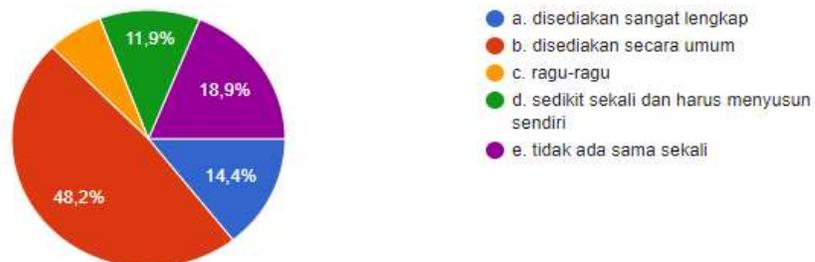


Chart 15 Ketersediaan materi/bahan dalam pelaksanaan tugas

Evaluasi Tugas

Data pada bagian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang kesesuaian capaian tugas pada level individu, satuan/bagian/polsek, dan level satwil. Hasil wawancara, FGD dan penelusuran dokumen secara umum mengungkapkan mekanisme kesesuaian capaian tugas pada level individu dengan level satuan/bagian dan dengan level satwil dilakukan melalui mekanisme supervisi, analisa evaluasi, dan *feedback* yang diterima oleh pelaksana.

Data yang disajikan pada berikut ini adalah menyangkut evaluasi yang dialami dan alami oleh responden penelitian pada saat mereka melakukan kegiatan penyuluhan, pencegahan, dan pemantauan kegiatan radikalisme di wilayah tempat tugasnya.

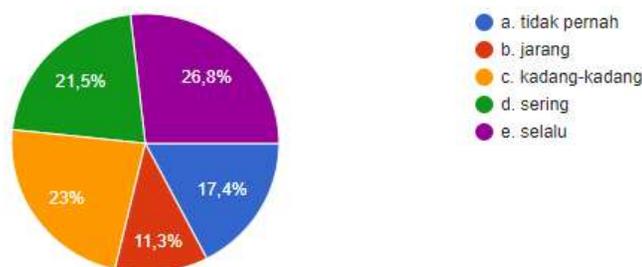


Chart 16 Rutinitas pelaporan kegiatan

Chart 16 menjelaskan bahwa rutinitas pelaporan kegiatan hanya dikerjakan oleh hampir sepertiga dari responden.

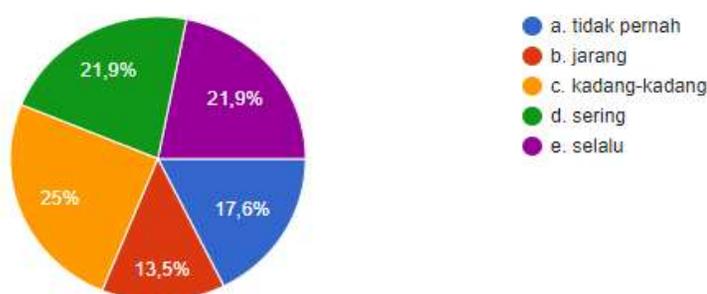


Chart 17 Rutinitas analisa dan evaluasi (anev) kegiatan

Chart 17 berisi informasi tentang pengalaman responden terhadap analisa dan evaluasi (anev) yang dialami selama menjalankan pekerjaan atau kegiatannya dalam penyuluhan,

pengecegan atau pemantauan radikalisme di wilayah kerjanya, terhitung 25% menyatakan kadang-kadang dilakukan anev.

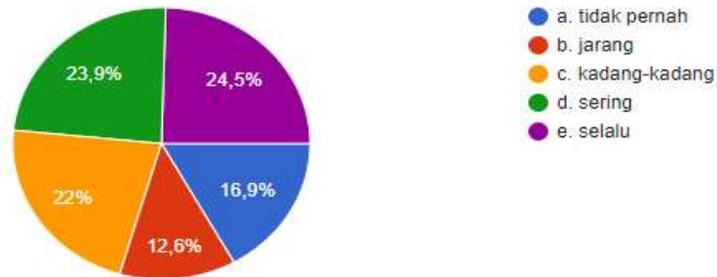


Chart 18 Pengalaman mendapat supervise dan bantuan dari rekan atau atasan

Chart 18 memperlihatkan pengalaman responden tentang supervisi, dibantu rekan atau atasan terhadap pekerjaan atau tugas yang dilakukannya dalam penyuluhan, pengecegan, maupun pemantauan radikalisme: 16,9% responden menyatakan tidak pernah mengalami; 12,6% menyatakan jarang mengalami; 22% menyatakan kadang-kadang mengalami; 23,9% menyatakan sering mengalami; dan 24,5% menyatakan selalu mendapatkan supervisi atau dibantu teman atau atasan.

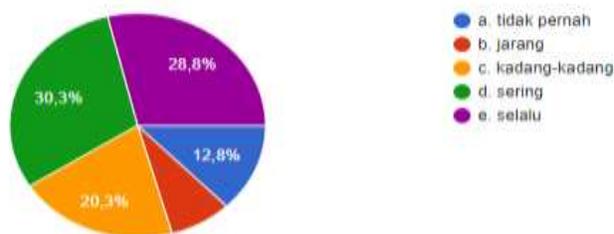


Chart 19 Pengetahuan tentang hasil ekerjaan

Chart 19 berisi pengalaman responden apakah dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan dia mengetahui dampak postif atau hasil dari pekerjaan yang dilakukannya: 12,8% menyatakan tidak pernah mengetahui dampak atau hasil dari kegiatan yang dilaksanakannya; 7,8% menyatakan jarang mengetahui; 20,3% menyatakan kadang-kadang mengetahui dan kadang-kadang tidak mengetahui dampak atau hasil dari kegiatan yang dilakukannya; 30,3% menyatakan sering mengetahui; dan 28,8 menyatakan selalu mengetahui dampak atau hasil dari kegiatan atau pekerjaan yang dilakukannya yang berkaiatan dengan bahaya radikalisme.

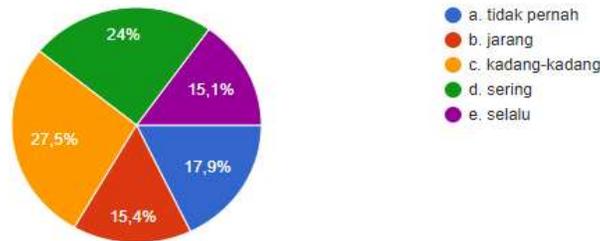


Chart 20 Pengalaman mendapatkan umpan balik

Chart 20 berisi informasi tentang pengalaman responden mendapatkan *feed back* atau masukan baru berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukannya: 17,9% menyatakan tidak pernah mendapatkan *feedback* atau masukan baru menyangkut pelaksanaan perkejaannya; 15,4% menyatakan jarang; 27,5% menyatakan kadang-kadang mendapatkan *feedback*; 24% menyatakan sering mendapatkan *feedback*; dan 15,1% menyatakan selalu mendapatkan *feedback* berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaannya yang berkaitan dengan bahaya radikalisme.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengetahuan anggota Polri tentang radikalisme dan terorisme

Mencermati informasi dan data yang disajikan pada bagian bab terdahulu, terkait dengan pengetahuan/pemahaman anggota Polri di lapangan tentang konsep, batasan dan bahaya radikalisme dan terorisme menyiratkan banyak hal. Konstruksi pemahaman anggota Polri tentang radikalisme dan terorisme dibentuk oleh beragam sumber pengetahuan yang beragam. Sejauh ini sumber pengetahuan utama anggota Polri di lapangan berkaitan dengan radikalisme dan terorisme bertumpu pada informasi yang tersedia di berbagai website yang tersedia secara *on-line*. Akses informasi lebih mengandalkan sumber terbuka yang dapat diakses melalui kegiatan *surfing* di laman google.

Informasi dari sumber terbuka di Internet sesungguhnya sangat memudahkan bagi anggota di lapangan untuk memahami sebuah isu atau konsep tertentu termasuk isu dan konsep radikalisme dan terorisme. Akan tetapi, menjadi media Internet, terutama sumber terbuka, sebagai rujukan utama tentu memiliki banyak sekali kelemahan, antara lain validitas informasi dan pengetahuan yang diperoleh tidak sepenuhnya dapat diverifikasi dan dipertanggung jawabkan. Kelemahan lainnya, bisa jadi informasi yang diakses adalah

informasi yang menggiring pada pemahaman yang sudah dikonstruksikan oleh pemberi informasi. Hal ini dapat menggiring anggota di lapangan untuk terjebak pada pengetahuan yang justru membawa pada pemahaman yang keliru bahkan bisa kontraproduktif.

Pada dasarnya menjadikan situs di Internet sebagai sumber pengetahuan dan rujukan dapat mendukung tujuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman sepanjang anggota di lapangan telah memiliki literasi yang cukup tentang isu dan konsep serta dapat memfilter informasi yang diakses melalui sumber informasi lainnya. Jika tidak, yang terjadi adalah justru anggota di lapangan dapat tergiring pada pengetahuan dan pemahaman yang bertolak belakang dengan tujuan awal mencari pengetahuan di internet. Tanpa literasi yang memadai, seseorang yang mencari informasi tentang radikalisme dan terorisme di Internet dapat mengalami keterpaparan paham radikal akibat ketidak mampuannya memfilter dan menyeleksi sumber informasi yang kredibel.

Dalam pendekatan kesisteman, sumber informasi yang diberikan kepada anggota di lapangan seharusnya adalah informasi yang disediakan dan telah diolah oleh bagian/fungsi yang memiliki kemampuan menyajikan informasi yang kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai rujukan.

Sumber informasi lain yang menjadi sumber pengetahuan anggota di lapangan adalah dari kegiatan penyuluhan atau sosialisasi. Sebagian besar responden menyatakan bahwa penyuluhan/sosialisasi adalah sumber pengetahuan yang sangat penting dan sangat mereka harapkan untuk terselenggara secara berkelanjutan. Dari hasil wawancara, anggota Polri di satuan kewilayahan sangat berharap dapat menerima sosialisasi dari otoritas yang kredibel seperti Densus 88 atau BNPT dan pakar terorisme dari perguruan tinggi. Pengetahuan dan materi yang diberikan melalui penyuluhan memiliki dampak ganda bagi anggota di lapangan. Selain menambah pengetahuan mereka, materi yang diberikan juga dapat digunakan untuk melakukan kegiatan penyuluhan ke masyarakat di mana mereka bertugas. Kesan haus akan pengetahuan mengenai radikalisme dan terorisme terasa pada saat kegiatan wawancara berlangsung. Banyak dari peserta wawancara yang meminta materi yang disajikan pada sesi pembuka wawancara. Antusiasme anggota di lapangan pada saat berdiskusi mengenai isu dan konsep radikalisme dan terorisme begitu kuat.

Media *mainstream* seperti televisi, radio dan koran/majalah juga masih menjadi rujukan dan saluran untuk mendapatkan pengetahuan mengenai radikalisme dan terorisme.

Menggalakkan dan menyediakan sumber informasi jenis ini memiliki keuntungan akan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini wajar mengingat informasi dari saluran ini lebih mudah diverifikasi dan penyedia informasinya juga jelas kelembagaannya. Dari sisi konten, informasi yang disajikan umumnya juga lebih ringan dan mudah dicerna.

Sumber pengetahuan lain yang juga menjadi rujukan bagi anggota Polri di satuan kewilayahan adalah dari atasan. Peran atasan masih begitu penting dalam memberikan pengetahuan bagi anggota mengenai radikalisme dan terorisme. Sejumlah peserta wawancara menyatakan bahwa informasi dari atasan biasanya diberikan pada saat pengarahan, pada saat apel atau pada saat kegiatan rapat. Pengetahuan yang bersumber dari atas diyakini oleh anggota sebagai rujukan yang bernilai dan dianggap memiliki kredibilitas yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dari beberapa sumber pengetahuan yang dijadikan rujukan oleh anggota Polri di lapangan dalam mendapatkan pengetahuan mengenai radikalisme dan terorisme, terkesan bahwa sumber pengetahuan yang beragam ini masih bersifat parsial. Belum ada pengelolaan sumber pengetahuan ini secara terintegrasi ke dalam sistem pengetahuan yang terelaborasi. Akan tetapi, bagi anggota di lapangan, sumber pengetahuan ini merupakan sandaran utama untuk memperoleh pengetahuan. Melalui konsep kesisteman, pengeolaan sumber informasi ini sangat penting untuk membangun tatakelola SDM polri dalam menangani persoalan radikalisme dan terorisme, paling tidak pada aspek pengetahuan.

Aspek utama yang menjadi fokus

Dalam konteks pendekatan kesisteman, pengelolaan SDM Polri dalam menangani persoalan radikalisme dan terorisme, aspek penting yang harus ditentukan oleh satuan kewilayahan adalah menetapkan aspek utama penanganan radikalisme dan terorisme yang menjadi fokus utama. Dari hasil wawancara dan FGD serta dokumen laporan kegiatan yang dibuat oleh satuan kewilayahan, aspek penting dari penanganan radikalisme dan terorisme yang menjadi fokus utama adalah pada dimensi preemtif dan preventif. Penetapan dimensi preemtif dan preventif dalam penanganan radikalisme dan terorisme oleh satuan kewilayahan didasarkan pada pemahaman bahwa aspek penindakan atau dimensi represif telah menjadi kewenangan dari Densus 88. Akan tetapi, pemahaman demikian tidak jarang menimbulkan keraguan bagi anggota intelijen di tingkat polres untuk menyentuh orang atau kelompok

radikal karena khawatir akan bersinggungan dengan pekerjaan Densus 88.

Dimensi preemtif yang menjadi bagian dari fokus pekerjaan satuan kewilayahan dalam penanganan radikalsime dan terorisme merupakan pekerjaan yang luas. Hal ini menyebabkan perlu pengelolaan SDM agar dapat menyentuh berbagai aspek preemtif dengan sumber daya yang terbatas. Memastikan masyarakat memahami bahaya radikalisme dan terorisme adalah fondasi utama yang dikerjakan oleh satuan kewilayahan agar masyarakat memiliki daya tangkal terhadap paham radikal dan gagasan teroris. Hal ini menjadi penting mengingat penyebaran radikalisme tidak lagi tersegmentasi pada kelompok sosiodemografis tertentu, tapi bisa menyasar secara acak warga masyarakat. Menurut petugas di lapangan, tingkat kesulitan menentukan masyarakat mana yang berpotensi terpapar sungguh merupakan tantangan tugas yang luar biasa. Anggota Polri yang bertugas di lapangan tidak lagi bisa menentukan siapa yang perlu mendapat sentuhan agar tidak terpapar radikalisme dan terorisme. Kondisi demikian menyebabkan dimensi preemtif menjadi sedemikian kompleks dan memerlukan dukungan sumberdaya yang besar untuk mengerjakannya. Berpikir dan bertindak sistemik menjadi kunci untuk meningkatkan kapasitas satuan kewilayahan dalam memberikan setuhan kepada masyarakat yang tidak tersegmentasi secara jelas.

Dimensi preventif juga bukanlah pekerjaan sederhana. Kompleksitas tantangan pada dimensi ini dipengaruhi oleh banyaknya saluran dan modus yang dapat digunakan oleh kelompok radikal untuk menyebarkan pahamnya. Pendekatan sosial (*social based*) adalah pilihan yang tidak bisa dihindarkan untuk membangun literasi bagi masyarakat dalam menghindari sebaran radikalisme, baik pada ranah luring maupun ranah daring. Sejauh ini penyebaran radikalisme bergerak pada kedua aras ini. Membangun pemahaman masyarakat tentang pengaruh radikalisme, bahaya radikalisme, dan modus radikalisme penting dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang dapat menolak paham radikal dan gagasan terorisme. Kompleksitas pada tataran preemtip juga mensyaratkan Polri harus menggunakan pendekatan yang berbasis komunitas (*community based*) dalam rangka mengerjakan pekerjaan pada ranah preventif. Membangun sebuah sistem kerja yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk secara aktif melakukan upaya pencegahan adalah bagian dari pendekatan kesisteman di mana anggota Polri bertindak sebagai fasilitator.

Bentuk kegiatan yang merupakan bagian dari pelaksanaan pekerjaan yang menjadi fokus satuan kewilayahan dalam penanganan radikalisme terdiri dari kegiatan deteksi, identifikasi,

pemetaan dan monitoring oleh fungsi intelijen. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, fungsi intelijen melakukan pendekatan penggalangan kepada orang atau kelompok yang diduga terpapar radikalisme. Kegiatan penggalangan ini juga dilakukan kepada mantan napi teroris dan keluarganya. Kesulitan utama yang dirasakan fungsi intelijen umumnya berkisar pada akses untuk masuk pada jaringan kelompok semacam ini dan kesulitan harus menyediakan sarana kontak (buah tangan berupa sembako) pada saat melakukan penggalangan dan monitoring. Kehati-hatian yang harus dijaga oleh fungsi intelijen dalam pelaksanaan kegiatan adalah memastikan bahwa sasaran kegiatan tidak dalam pantauan atau sentuhan Densus 88 Polri.

Bentuk kegiatan lainnya yang merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan yang menjadi fokus dari satuan kewilayahan adalah kegiatan sambang, penyuluhan yang dilakukan oleh fungsi Binmas, terutama kegiatan Bhabinkamtibmas. Kegiatan penyuluhan dilakukan di sekolah-sekolah, pesantren-pesanteran, dan kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Selain dalam format sosialisasi, kegiatan penyuluhan berupa pesan-pesan kamtibmas untuk mengingatkan masyarakat akan bahayanya radikalisme dan terorisme. Himbauan dalam bentuk spanduk juga dilakukan di tempat-tempat umum di mana masyarakat banyak beraktifitas. Kegiatan sambang juga dilakukan oleh bhabinkamtibmas dari pintu ke pintu (*door to door system*) kepada warga yang berada di wilayah kerja anggota bhabinkamtibmas. Kesulitan yang umumnya dirasakan adalah tidak tersedianya materi yang akan digunakan dalam sosialisasi dan penyuluhan, sehingga anggota di lapangan harus menyusun sendiri materi penyuluhan dengan mengambil bahan dari *open source* di Internet, atau memanfaatkan materi sosialisasi yang pernah didapatkannya.

Mekanisme pembagian tugas

Aspek penting dalam pendekatan kesisteman adalah bagaimana membagi pekerjaan kepada komponen-komponen organisasi sehingga pola kerja bergerak dalam irama yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Setelah ditetapkan aspek yang menjadi fokus satuan kewilayahan dalam penanganan radikalisme dan terorisme, maka membagi pekerjaan adalah hal yang sangat penting. Secara umum, pembagian pekerjaan dalam penanganan radikalisme dan terorisme yang begitu luas, dibagi secara berjenjang sesuai dengan aspek penting yang menjadi perhatian utama satuan kewilayahan. Setelah ditetapkan aspek yang menjadi peran

dari satuan kewilayahan dalam penanganan penyebaran radikalisme dan terorisme, pekerjaan dikerjakan oleh masing-masing bagian dan fungsi selaras dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Artinya penanganan persoalan radikalisme dan terorisme di satuan kewilayahan melekat ke dalam tugas pokok masing-masing satuan fungsi dan dikerjakan sesuai mekanisme kerja yang berlaku secara umum sebagaimana persoalan kepolisian lainnya.

Distribusi pekerjaan dalam penanganan radikalisme dan terorisme dilakukan ke tingkat unit mengikuti alur pekerjaan rutin. Pelaksanaan tugas dilakukan dengan pola kerja yang berbentuk tim maupun yang dikerjakan secara individual. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pekerjaan masih terkesan parsial dan belum berorientasi pada sistem yang terintegrasi. Hal ini dapat terlihat pada pernyataan pada bab terdahulu di mana pekerjaan yang dilakukan oleh anggota di lapangan tidak berbeda dengan pekerjaan yang dilakukan oleh rekan kerjanya yang lain. Pekerjaan yang dilaksanakan dalam tim umumnya masih didominasi oleh fungsi intelijen. Dalam kegiatan sehari-hari, fungsi intelijen membagi pekerjaan penanganan radikalisme dan terorisme ada yang dikerjakan dalam bentuk tim dan ada yang dikerjakan secara individual pada area kerja masing-masing.

Hasil pengumpulan data juga memperlihatkan bahwa pola kerja yang berbasis dan berorientasi pada model kesisteman belum begitu kuat terlihat. Pelaksanaan kerja memang sudah dikerjakan secara organis oleh masing-masing bagian, akan tetapi belum terintegrasi secara utuh dalam pola kerja kesisteman yang bersifat menyeluruh. Kesan ini juga diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data melalui FGD. Masing-masing bagian dan fungsi bekerja berdasarkan tugas dan perannya masing-masing. Distribusi informasi atas hasil kerja belum secara kuat mewarnai pekerjaan bagi bagian atau fungsi lain.

Cara kerja yang bersifat organis memang dapat menyelesaikan pekerjaan yang menjadi porsi dari masing-masing bagian. Akan tetapi, pekerjaan yang diselesaikan bersifat parsial dan *impact*-nya bagi pencapaian tujuan secara keseluruhan tidak begitu kuat karena masing-masing sumberdaya sangat mungkin mengerjakan pekerjaan yang sama atau bahkan mengulang pekerjaan pada bagian atau fungsi yang lain. Agar pelaksanaan pekerjaan penanganan radikalisme dan terorisme oleh satuan kewilayahan memiliki *impact* yang lebih luas, maka pekerjaan harus berbasis pada sistem. Hal ini juga untuk mengurangi konstrain yang ada dalam level satuan kewilayahan, terutama keterbatasan SDM dan kemampuan menjangkau persoalan yang tidak optimal.

Mekanisme memastikan kesesuaian capaian

Dalam pendekatan kesisteman pengelolaan SDM, aspek yang juga tidak kalah pentingnya adalah memastikan kesesuaian capaian pada level individu dengan level organisasional. Dari data yang telah disajikan pada bab terdahulu, baik data survai maupun informasi wawancara dan FGD, mekanisme memastikan kesesuaian capaian pada level individu dengan capaian pada level bagian dan fungsi serta dengan capaian yang seharusnya pada level satuan kewilayahan, masih bersandar pada mekanisme analisa dan evaluasi.

Analisa dan evaluasi yang menjadi sadaran tersebut ternyata masih mengandung beberapa kelemahan, yaitu tingkat pelaporan hasil pekerjaan pada level individual tidak merata. Ada yang secara rutin membuat laporan, ada yang hanya kadang-kadang membuat laporan, dan bahkan ada yang tidak pernah membuat laporan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang merupakan bagian dari penanganan radikalisme dan terorisme di wilayahnya. Kondisi pelaporan yang frekuensinya tidak ajeg semacam ini tentu akan berpengaruh pada sinkronisasi capaian pada level individual dengan level organisasional.

Intensitas proses analisa dan evaluasi yang tidak optimal akan menyebabkan sulitnya mengukur capaian target dan kesesuaian target. Yang tidak kalah pentingnya dalam konteks sistem, masukan dan *feedback* bagi pelaksana lapangan akan sangat terbatas dan tidak tersedianya ruang untuk memperbaiki mekanisme dan metode kerja. Dalam perspektif kesisteman, hal ini tentu saja mencerminkan bahwa pelaksanaan kerja belum berorientasi pada sebuah sistem kerja.

Analisa dan evaluasi merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan pekerjaan, baik pada level individual maupun organisasional. Dalam kegiatan penanganan radikalisme dan terorisme, seandainya proses ini tidak sepenuhnya dilakukan maka bekerjanya sistem akan menjadi terganggu dan proses perbaikan mekanisme dan metode kerja yang berkelanjutan akan mengalami stagnasi. Analisa dan evaluasi yang rutin dan berkelanjutan merupakan jaminan bagi bekerjanya sistem secara optimal. Bagi anggota di lapangan analisa dan evaluasi memungkinkan mereka mendapatkan koreksi dan umpan balik bagi pelaksanaan tugasnya. Pada sisi lain proses analisa dan evaluasi akan menjadi sarana bagi pelaksana lapangan untuk mengemukakan hambatan-hambatan yang dialaminya dan sekaligus menemukan solusi terhadap hambatan tersebut.

Fakta lain yang juga terungkap dari data yang disajikan pada bab sebelumnya adalah

hanya sebagian kecil saja anggota yang melakukan pekerjaannya mendapatkan asistensi dan umpan balik atas hasil pelaksanaan tugasnya. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan tugas penanganan radikalisme dan terorisme masih belum dilakukan berbasis pada sistem yang terintegrasi. SDM yang melaksanakan pekerjaannya belum digerakkan dan dikelola secara sistem untuk menangani persoalan penyebaran radikalisme dan terorisme di wilayah kerja.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

1. Pengetahuan dan pemahaman anggota Polri yang menjadi subyek penelitian tentang radikalisme dan terorisme relatif sudah baik, namun masih bertumpu pada batasan normatif. Berdasarkan hasil FGD masih didapat kesan belum kuatnya pemahaman tentang dinamika radikalisme dan terorisme yang terus berkembang seiring perkembangan teknologi informasi yang semakin luas dan massif. Hasil penelitian belum menemukan adanya proses *up dating* pengetahuan, kemampuan, dan cara kerja yang dilakukan secara sistematis dan berkala yang selaras dengan perkembangan dinamika ancaman penyebaran radikalsime dan terrorisme di tengah masyarakat.
2. Pendekatan kesisteman penanganan radikalisme dan terorisme belum sepenuhnya menjadi pola yang terintegrasi di antara bagian, satuan dan fungsi karena masing-masing bagian, satuan dan fungsi masih bekerja secara parsial berdasarkan pemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fokus dan sasaran kerja pada beberapa aspek masih *overlapping* dan *impact* yang diharapkan belum optimal.
3. Tata kelola SDM dalam menghadapi ancaman penyebaran radikalisme dan teorisme yang kian meluas dan massif, belum dirancang sesuai perkembangan hakikat ancaman. Pada hal saat ini pemanfaatan teknologi informasi semakin luas dengan beragam *platform* media informasi yang digunakan penyebar radikalisme dan gagasan terorisme. Fungsi Intel lebih mengedepankan deteksi, dan penggalangan. Sementara fungsi Binmas yang dimotori oleh Bahabinkamtibmas sebagai ujung tombak masih mengandalkan kegiatan penyuluhan tatap muka, kegiatan sampaing dengan metode *door to door system* (DDS). Petugas lapangan masih merasakan kesulitan untuk membuat materi penyuluhan karena keterbatasan pengetahuan.

4. Penanganan penyebaran radikalisme dan terorisme yang berlangsung di satuan kewilayahan masih bertumpu pada fungsi Intelijen dan fungsi Binmas

Rekomendasi

1. Satuan kewilayahan hendaknya membangun sistem pengetahuan yang berbasis kesisteman yang dapat memastikan tingkat pengetahuan anggota yang memadai berkaitan dengan batasan, makna, isu dan fenomena radikalisme dan terorisme.
2. Sumber pengetahuan tentang radikalisme dan terorisme perlu disediakan, terutama difasilitasi oleh para perwira sehingga anggota di lapangan memiliki sumber rujukan yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Penentuan aspek penting dalam penanganan radikalisme dan terorisme yang menjadi fokus utama dari satuan kewilayahan hendaknya didasarkan pada hakikat ancaman penyebaran radikalisme dan terorisme yang berkembang saat ini dan didasarkan pada kondisi lokalitas satuan kewilayahan melalui batasan permasalahan di level masing-masing bagian, satuan dan fungsi.
4. Mekanisme pembagian pekerjaan dan metode pelaksanaan pekerjaan penanganan radikalisme dan terorisme di satuan kewilayahan sebaiknya dilakukan dalam rapat kerja yang melibatkan semua bagian, satuan dan fungsi. Hal ini untuk memastikan porsi tugas masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dan memungkinkan masing-masing bagian dan satuan fungsi untuk memastikan kontribusinya terhadap bagian dan fungsi yang lain. Hal ini bermanfaat untuk mengaktifkan SDM yang terbatas dan memastikan seluruh aspek persoalan radikalisme dan terorisme dapat disentuh.
5. Frekuensi analisis dan evaluasi yang bersifat spesifik berkaitan dengan pelaksanaan tugas penanganan radikalisme dan terorisme hendaknya dilakukan secara rutin dan berkelanjutan untuk menyalurkan dan memastikan capaian target pekerjaan pada level individual dan level organisasional selalu terjaga. Hal ini sekaligus dapat menjadi ruang bagi anggota di lapangan untuk mendapatkan umpan balik, menyampaikan hambatan, dan menemukan solusi atas hambatan yang dialami, sekaligus memperbaiki metode kerja lanjutan.

Daftar Pustaka

- Donnadieu, 2017 dalam [Juan Aparicio, Dorys Yaneth Rodríguez, Jon Mikel Zabala-Iturriagoitia](#), The systemic approach as an instrument to evaluate higher education systems: Opportunities and challenges, *Research Evaluation*, Volume 30, Issue 3, July 2021, Pages 336–348, <https://doi.org/10.1093/reseval/rvab012>
- Franck, T.M. 1978 *International Legal Action & Terrorism*, I, No.2., pp. 187-197
- Golose, Petrus Reinhard, *Deradikalisasi Terorisme Humanis Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumpit*, Jakarta: Yayasan PengembanganKajian Ilmu Kepolisian, 2009.
- Hoffman, B. 1998 *Inside Terrorism*. New York: Columbia University Press.
- Laqueur, W. 1999 *The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction*. New York: Oxford University Press.
- Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) melalui *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*,
- Nacos, Brigitte L. dan Oscar Torres-Reyna. (2003). 'Framing Muslim Americans Before and After 9/11.' Dalam Pippa Norris, Montague Kern dan Marion Just (eds.). *Framing Terrorism: The News Media, the Government and the Public*. New York: Routledge. hal. 133 -157
- Sarinastiti & Vardhani, 2018, *Internet dan Terorisme : Menguatnya Aksi Global Cyber-Terrorism New Media*, Jurnal Gama Societa, vol.1 no.1
- Schaefer, Todd M. (2003). 'Framing the US Embassy Bombings and September 11 Attacks in African and US Newspaper.' Dalam Pippa Norris, Montague Kern dan Marion just (eds.). *Framing Terrorism: The News Media, the Government and the Public*. New York: Routledge. hal. 93-171
- Schmid, Alex & Jongman, Albert. 1988. *Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories, and Literature*. Amsterdam: North Holland, Translation Books.
- Soriano, Manuel Torres. "Terrorism and the Mass Media after Al Qaeda: A Change of Course?" *Athena Intelligence Journal*, Vol. 3, No 1, (2008), pp. 1-20
- UN Security Council Resolution 1566, "Terrorism". 2004. Source: <http://www.cfr.org/international-organizations-and-alliances/un-security-council-resolution-1566-terrorism/p11223>, downloaded: 21/02/2016.